

PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT, KOMPETENSI PENDAMPING DESA, KOMPETENSI APARATUR DESA, KUALITAS PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA KOMITMEN PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP KEBERHASILAN PENGELOLAAN DANA DESA

Anisyah Martha Dilla¹⁾, Isma Coryanata²⁾

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu

E-mail: anisyahmarthad@gmail.com

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu

E-mail: ismacoryanata06@gmail.com

Abstract

This study aims to test and prove the influence of community participation variables, the competence of village assistants, the competence of village officials, the quality of supervision of village consultative bodies and the commitment of local governments to the successful management of village funds in Kaur Tengah District, Kaur Regency. This research uses quantitative methods. The sampling technique used is non probability sampling (saturated sampling) and the type of data in this study is primary data. The sample in this study were all village governments (Village Head (Kades), Village Secretary (Sekdes), Village Treasurer, Head of Affairs (Kaur), Section Head (Kasi)) as many as 96 people. The data collection technique used in this study was through distributing questionnaires to respondents. Technical analysis and hypothesis testing using Partial Least Square (PLS) tools using SmartPLS 4.0 application software. The results of this study indicate that community participation, the competence of village assistants, the competence of village officials have a positive and significant effect on the successful management of village funds, and the quality of supervision of village councils and local government commitment have no effect on the successful management of village funds.

Keywords :Village Fund Management Success; Local Government Commitment; Village Facilitator Competence; Village Facilitator Competence; Quality of Village Council Supervision; Community Participation.

1. PENDAHULUAN

Desentralisasi mengarah pada tindakan pendelegasian atas unsur kekuasaan yang melibatkan pemerintah dari tingkatan pusat ke tingkatan daerah. Implementasi desentralisasi di Indonesia mengarah pada penyerahan wewenang yang melibatkan pemerintah pusat untuk kemudian terkena secara sistematis dengan rujukannya yakni pemerintah daerah atau bisa juga melibatkan pemerintah daerah yang kemudian mengarah ke tingkat desa. Tujuan dari kebijakan pemerintah untuk memberikan otonomi kepada desa yakni untuk membangun fondasi demi kemajuan di desa yang bersangkutan tersebut. Hal ini sebenarnya sudah terlihat secara jelas pada RPJMN alias Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional di tahun 2020-2024, dengan komitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan memperluas wilayah terpencil Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengatasi masalah kemiskinan dan kerentanan yang disebabkan oleh ketidaksetaraan pembangunan yang telah terjadi (National Development Planning Agency (Bappenas), 2020)

Kemiskinan masih menjadi permasalahan utama yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini. Kemiskinan juga menjadi penyebab sulitnya Indonesia menjadi negara maju. Berlandaskan

data yang termaktub pada BPS 2022, telah terhimpun sejumlah data berkaitan dengan angka kemiskinan di tahun tersebut mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2021. Meskipun angka kemiskinan di Indonesia cenderung menurun, namun angka yang tersaji sebagai representasi atas realitas di kehidupan bermasyarakat sifatnya masih terbilang cukup tinggi. Berdasarkan data tersebut menyebutkan tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 9,57% atau 26,36 juta orang sedangkan tahun 2021 menunjukkan 9,71% atau 26,5 juta orang. Sehingga tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2021-2022 mengalami penurunan sebesar 0,14% atau dengan kata lain, keberadaan masyarakat yang golongannya miskin di negara ini terbilang sudah berkurang dengan perolehan angka 140 ribu jiwa. Indonesia memiliki perdesaan mencapai 83.794 desa dengan tingkat kemiskinan di Indonesia lebih besar di perdesaan dari pada di perkotaan, tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 9,57%, atau 26,36 juta orang dengan 14,38 juta orang di perdesaan dan 11,98 juta orang di perkotaan. Informasi tentang perdesaan ini sangat membantu pemerintah pusat dalam upayanya untuk mencapai cita-cita nasional, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, yang secara lugas telah terefleksi dalam gagasan yang tertuang di sila-sila Pancasila sekaligus UUD 1945 dan hal tersebut bisa dipahami bahwasanya desa memiliki andil yang derajatnya terbilang sangat besar atas konteks kemajuan dari bangsa Indonesia secara menyeluruh, khususnya dalam membasmi kemiskinan yang ada.

Berjalannya waktu di 2014, sebenarnya pihak pemerintah sudah mengupayakan sejumlah rancangan program nawacita dengan tajuk “Membangun dari Pinggiran Desa” guna pemaksimalan rasa sejahtera sekaligus kualitas hidup masyarakat desa. Memposisikan desa sebagai “Pilar Utama” dalam upaya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (UU Desa No. 6 Tahun 2014). Upaya demikian bisa diamati secara lebih gamblang melibatkan pihak pemerintah pusat yang sudah melakukan pengalokasian sejumlah dana dengan sifat signifikan untuk kepentingan pendukung dari program dana desa sejak 2015, dengan tujuan meningkatkan status pembangunan desa untuk mencapai tingkat perkembangan dan kemandirian yang lebih tinggi. Besaran anggaran dana desa terus meningkat sejak tahun 2015. Perbandingan anggaran dari tahun 2016 hingga 2021, seperti yang dilaporkan oleh Kementerian Keuangan pada tahun 2022.

Merunut pada keterangan yang termaktub di Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014, pemerintah pusat mengalokasikan dana desa setiap tahun dari APBN. Dana ini kemudian diberikan kepada kepala desa untuk digunakan untuk tujuan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan sosial. Program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat akan diprioritaskan dalam pemanfaatan dana ini. Sumber pendapatan desa juga meningkat secara signifikan berkat bantuan APBN ini. Merujuk pada keterangan yang tersaji pada Pasal 72 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 terkait Desa, pemberian bantuan keuangan kepada desa sejalan dengan ketentuan tersebut. Dalam hubungannya dengan pemerintah tingkat kabupaten, kepala desa senantiasa mengembangkan tanggung jawab atas keseluruhan anggaran yang secara khusus diperuntukkan bagi desa tersebut. Hal ini diatur dalam Permendagri No 20 Tahun 2018, yang khusus melakukan pengaturan atas skema tata kelola uang desa.

Pihak pemerintah pusat sudah mengupayakan pengalokasian sejumlah dana yang sifatnya signifikan untuk kepentingan pendukung program dana desa sejak tahun 2015, dengan tujuan meningkatkan status pembangunan desa untuk mencapai tingkat perkembangan dan kemandirian yang lebih tinggi. Besaran anggaran dana desa terus meningkat sejak tahun 2015. Perbandingan anggaran dari tahun 2016 hingga 2021, seperti yang dilaporkan oleh Kementerian Keuangan pada tahun 2022.

Tabel 1. Jumlah Anggaran Dana Desa Tahun 2015-2021

Tahun	Jumlah Anggaran (Triliun)
2015	20,8
2016	46,7
2017	59,8
2018	59,9
2019	69,8
2020	71,2
2021	72

Sumber: Kementerian Keuangan, (2022)

Dengan meningkatnya jumlah dana yang disediakan untuk desa, ini terutama berdampak positif pada peningkatan infrastruktur jalan, jembatan, saluran air, sekolah, dan fasilitas lainnya. Meskipun demikian, perlu diakui bahwa adanya peningkatan dana desa, selain memberikan keuntungan, juga menimbulkan tantangan dan menjadi masalah yang serius. Menurut data ICW tahun 2021, anggaran dana desa adalah bidang yang paling banyak mengalami penyalahgunaan dana publik oleh penegak hukum. Ada 154 kasus pada tahun tersebut, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp233 miliar. Sebuah penyelidikan yang dilakukan oleh LSM Jaringan Paralegal Indonesia (JPI) menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman tentang cara mengelola dan memanfaatkan anggaran adalah faktor lain yang menyebabkan korupsi di tingkat desa. Oleh karena itu, upaya pengelolaan yang efektif diperlukan untuk mengurangi kemungkinan bahwa dana desa yang disediakan oleh pemerintah pusat disalahgunakan.

Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur memiliki 9 desa/kelurahan dengan total populasi 5.100 jiwa. Kecamatan Kaur Tengah ini termasuk satu dari 14 kecamatan di Kabupaten Kaur di awal tahun 2023 realisasi pencairan dana desa tahap pertama hanya 30%. Ini disebabkan karena masalah administrasi yang belum diselesaikan (rbtv.disway.id, 2023). Selain itu, kasus lain yang terjadi di Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari Tribun Sumatera.Com dari Kaur, pembangunan Drainase Desa Padang Baru, Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur, adanya mark up anggaran dana desa (DD) terhadap pembangunan jalan rabat beton didesa setempat. Jum”at (19/08/2022).

Riset ini memiliki tujuan spesifik dalam memahami terkait pengaruh partisipasi masyarakat, selanjutnya mengarah pada kompetensi pendamping desa, sekaligus kompetensi aparatur desa dan kualitas pengawasan badan permusyawaratan desa serta komitmen pemerintah daerah yang secara khusus diperuntukkan bagi keberhasilan dalam tata kelola dana desa yang bersangkutan.

Penelitian ini akan menginvestigasi lebih jauh untuk memahami :

1. Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa
2. Pengaruh kompetensi pendamping desa terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa
3. Pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa
4. Pengaruh kualitas pengawasan badan permusyawaratan desa terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa
5. Pengaruh komitmen pemerintahan desa terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa

Mengarah ke gagasan pakar (Mulyanto,2015) dalam (Atmadja & Saputra, 2018), dipaparkan kalau besaran alokasi Dana desa yang secara spesifik diupayakan penganggarannya dari pihak pemerintah pusat menjadikan desa-desa yang bersangkutan harus senantiasa mengupayakan tindakan secara profesionalisme dalam tata kelola keuangan dan manajemen yang terbilang harus mumpuni. Kalau berpijak pada keterangan yang termaktub dalam UU No 6 tahun 2014 terkait desa, sebenarnya sudah banyak pengharapan yang muncul tidak hanya dari

pihak pemerintah tapi masyarakat secara meluas dengan program tersebut. Penting dipahami pula bahwa masyarakat desa yang memiliki kekuatan dan kualitas hidup dengan layak menjadikan pengharapan paling tinggi untuk bisa diraih dan diimplementasikan secara konkret dalam kehidupan. Dengan adanya pengharapan tersebut menjadikan desa harus senantiasa mengupayakan sejumlah tata kelola atas dana desa dengan lebih maksimal, yang dibarengi dengan pembenahan lain yang memang menjadi urgensinya, seperti perbaikan SDM sekaligus komitmen dari pemerintah desa yang secara khusus diperuntukkan bagi pembangunan dan unsur lain yang memiliki urgensi di dalamnya.

Riset ini disusun dengan sistematika kepenulisan yang memuat beberapa bagian. Pada bagian selanjutnya akan dipaparkan sejumlah telaah berbasis literatur dan dibarengi perumusan hipotesis yang hendak diupayakan pengujian pada tahap lanjutan. Sementara untuk bagian yang lebih lanjutnya menerangkan secara lebih rinci terkait metode yang dilibatkan dibarengi pembahasan atas hasil riset dan kemudian ditutup dengan pemberian konklusi atau kesimpulan dan juga paparan keterbatasan hingga pemberian saran guna perbaikan lebih baik di masa mendatang.

TELAHAH LITERATUR DAN HIPOTESIS

Stewardship theory

Pondasi dari riset ini mengarah pada grand theory yang secara spesifik dikaitkan dengan stewardship theory dengan penggambaran sebagai situasi yang mana pihak manajer memprioritaskan kepentingan dari organisasi tersebut sebagai basis tujuan pokok, bukan malah melakukan hal-hal yang menjadikannya sebagai suatu kepentingan berbasis individu semata. Konsep tersebut sebenarnya sudah diperkenalkan oleh pakar bernama Donaldson & Davis pada (1989). Secara prinsip teori stewardship mengacu pada keyakinan akan sifat dasar manusia yang sebenarnya bisa dipercaya dan juga mengemban sejumlah tanggung jawab secara maksimal hingga mengedepankan kejujuran sekaligus mengantongi sejumlah integritas ketika melangsungkan sejumlah tindakan saat dilakukan secara sadar.

Dengan dasar teori-teorship ini ada korelasi yang cukup erat terkait kepuasan dan juga kesuksesan dalam suatu organisasi. Kesuksesan tersebut bisa diraih dengan mekanisme optimalisasi atas kinerja *steward* dan *principal*. Namun, dalam sektor publik, tuntutan akuntabilitas membuat "*principal*" menghadapi kesulitan dalam melaksanakan fungsi pengelolaan secara mandiri. Dengan begitu butuh pemisahan terkait fungsi dari kepemilikan dan juga fungsi dari tata pengelolaan yang mendatangkan konsekuensi kalau steward diberi amanah untuk melakukan tata kelola atas sumber daya yang bersangkutan demikian. Hal ini menjadikan konsep atas teori tanggung jawab mempunyai implikasi krusial dalam ranah riset yang diulik dan dikaji pihak peneliti yakni melangsungkan penggambaran atas peran dari pihak pemerintah desa selaku sektor publik yang sudah sepatutnya memperoleh label kepercayaan sekaligus menjadi media untuk menampung aspirasi masyarakat, dan menghadirkan sejumlah layanan dengan maksimal, dibarengi tanggung jawab terkait amanah yang sudah diberikan, dan benar-benar merepresentasikan layanan secara baik yang diperuntukkan bagi publik, sehingga tujuan untuk kepentingan bersama dapat terwujud secara optimal dan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai secara maksimal.

Pengaruh Partisipasi masyarakat terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa

Partisipasi Masyarakat ini bisa didefinisikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan untuk kepentingan perwujudan atas pembangunan desa yang sejalan dengan kebutuhannya. Dengan demikian, keikutsertaan masyarakat menghadirkan kontribusi sekaligus penunjang atas keberhasilan program dalam tata kelola dana desa sekaligus keterlibatan masyarakat secara masif

dalam pengambilan dan pembuatan keputusan mencegah munculnya kecurigaan yang acap kali mendekam dalam benak masyarakat sekaligus asimetri terkait informasi yang berkaitan dengan pihak masyarakat selaku partisipans dan pihak pemerintah desa sebagai stewardnya (Anugrah et al., 2022). Melalui riset (Aprilya & Fitria Astri, 2020) (Nurkhasanah, 2019) menerangkan jika partisipasi masyarakat tidak mendatangkan pengaruh atas tata kelola dana desa yang mana hal tersebut justru berbeda dengan riset (Julianto & Dewi, 2019), (Atiningsih & Ningtyas, 2019), (Hasanah, 2021), (G. Dewi, 2019) yang menegaskan kalau partisipasi dari masyarakat mempunyai pengaruh dengan sifatnya yang signifikan terkait keberhasilan dari tata kelola dana desa yang bersangkutan tersebut.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis pertama :

H1: Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa

Pengaruh Kompetensi Pendamping Desa Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa

Bahasa yang mengarah pada pendamping desa bisa diberikan label definisi sebagai pihak dari sebuah mekanisme tertentu yang dilaksanakan dengan basis tujuan guna melakukan suatu hal yang ada sangkutpautnya dengan tindakan atas pemberdayaan masyarakat dengan upaya melalui jalur asistensi atau pengorganisasian hingga pengarahan secara khusus yang dibarengi pemberian fasilitas atas desa yang bersangkutan (L. P. P. Dewi & Dewi, 2021). Sementara kompetensi mengarah pada suatu hal yang memiliki korelasi atas perwujudan sikap kemudian bisa juga dikaitkan dengan watak kepribadian hingga unsur pengetahuan yang sudah diperoleh seorang individu. Jadi bisa dikatakan kalau peranti dari tata kelola Dana desa memiliki kompetensi yang maksimal hal ini berimbas pada tata kelola desa yang terbilang lebih akuntabel juga, jadi kompetensi atas pendamping desa memiliki aspek krusial dalam hal keberhasilan dari tata kelola dana desa tersebut. Jika berpijak dengan teori stewardship yang berkaitan dengan organisasi berbasis publik, di dalamnya memuat peran atas pendamping desa yang memiliki tindakan sebagai steward dengan penekanan atas kecakapan dalam konteks penghadiran layanan secara maksimal yang diperuntukkan secara khusus bagi masyarakat selaku principals, dengan begitu organisasi masih mengemban reputasi atas kinerja secara unggul dan juga akuntabel di mata masyarakat secara meluas. Kalau berkaca pada riset yang sudah digagas oleh peneliti terdahulu yakni (Nurkhasanah, 2019) menerangkan jika kompetensi pendamping desa mendatangkan pengaruh secara negatif terkait tata kelola dari dana desa namun hal tersebut berbeda dengan riset (Priantana, 2023), (Nurhalimah & Supriyadi, 2022), (Atmadja et al., 2018) yang menegaskan kalau kompetensi pendamping desa justru mempunyai pengaruh dengan sifat yang signifikan terkait keberhasilan dari tata kelola dana desa.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis kedua :

H2: Kompetensi pendamping desa berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa

Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa

Bahasan selanjutnya terkait kompetensi aparatur desa yang mana hal ini bisa dikaitkan dengan kecakapan atau kemampuan yang dipunyai aparatur desa dalam konteks melangsungkan tindakan atau pekerjaan dan tiap-tiap individu di dalamnya mengantongi sejumlah kecakapan secara berbeda yang bisa diamati dari berbagai aspek dengan ranah pengetahuan atau skill, baik yang kategorinya soft skill ataupun hard skill, dan juga tindakan sekaligus sikap dari individu yang bersangkutan tersebut. Lebih lanjut dipaparkan jika kompetensi aparatur desa di sini mengarah pada bahasan kemampuan SDM guna melangsungkan sejumlah tugas yang sudah diemban sekaligus tanggung jawab yang telah diberikan kepada dirinya sebagai perbekalan

untuk melaksanakan pekerjaannya dibarengi dengan aspek pendidikan atau pelatihan hingga konteks pengalaman yang terbilang memadai (Kharis, 2019). Berpijak pada teori stewardship menerangkan kalau yang dimaksud kompetensi aparatur desa sebenarnya bisa diamati secara lebih lugas melalui prosedur atas kinerja aparatur desa yang bisa menghadirkan keputusan sekaligus melakukan penentuan atas tindakan yang dinilai paling tepat dalam hal meraih tujuan terkait optimalisasi dari kinerja perusahaan sebagai objek yang harus dipimpin (Suryani & Suprasto, 2021).

Paparan tersebut sebenarnya sejalan dengan teori stewardship dimana pihak principals menghadirkan sejumlah wewenang kepada pihak steward untuk melangsungkan tindakan berupa melakukan pekerjaan yang sudah dijadikan limpahan amanah, yang mana aparatur sebagai steward yang dinilai oleh masyarakat sebagai partisipals dengan tugas yakni sebagai pelayan mempunyai kewajiban dalam melangsungkan layanan sebagai perwujudan atas akuntabilitas untuk menunjang keberhasilan dalam pengelolaan dana desa. Sehingga konsekuensi selanjutnya berkaitan dengan pengambilan putusan yang dinilai tepat untuk menghadirkan layanan secara maksimal sejalan dengan paparan tugas yang harus diemban oleh seorang aparatur. Riset yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya (Aprilya & Fitria Astri, 2020), (Periansya & Sopiyan, 2020), (Suryani & Suprasto, 2021), (Atiningsih & Ningtyas, 2019), (Wicaksana & Rachman, 2018), menyampaikan kalau kompetensi aparatur desa mempunyai pengaruh dengan sifat yang signifikan terkait pengelolaan dana desa.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis ketiga :

H3: Kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa

Pengaruh Kualitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa

BPD alias badan permusyawaratan desa dapat diartikan sebagai lembaga berbasis legislasi sekaligus media yang diperuntukkan bagi keberfungsian untuk memperlancar penampungan sekaligus penyaluran aspirasi masyarakat desa. Lembaga demikian sebagai perwujudan atas skema pengawasan yang mempunyai kewajiban dalam melangsungkan kontrol terkait implementasi peraturan desa, sekaligus APBDes, dan juga keberlangsungan pemerintahan desa. Kalau berkaca pada teori stewardship menekankan jika pemerintah desa selaku pengurus yang mana hal ini juga menjadi bagian dari steward akan cenderung lebih berhati-hati dalam konteks tata kelola dana desa dikarenakan mereka akan diawasi oleh dua pihak tidak hanya pemerintah dalam hal BPD tapi juga masyarakat sebagai partisipalnya, apakah benar keberlangsungan tersebut sejalan dengan peraturan pemerintah yang ada. Pengawasan tersebut membantu pelaksanaan kebijakan agar tujuan dapat dicapai dengan baik. Mengacu pada temuan riset ilmiah oleh (Adha, 2019), (I Komang Gerdion Ananda Junior et al., 2021), (Deny & Khasna, 2022) mendapatkan pengaruh atas keberhasilan pengelolaan dana desa.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis keempat :

H4: Kualitas pengawasan badan permusyawaratan desa berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa

Pengaruh Komitmen Pemerintah Daerah Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa

Bahasan selanjutnya terkait komitmen organisasi yang bisa diartikan sebagai perwujudan atas perasaan kemudian dikaitkan dengan unsur sikap hingga perilaku dari tiap-tiap individu ketika melangsungkan identifikasi atas diri sendiri sebagai bagian dari organisasi yang mana hal

tersebut memiliki keterlibatan dalam mekanisme kegiatan organisasi sekaligus sifat loyal akan organisasi dalam konteks meraih tujuan yang hendak dicapai (Oktaviani & Pramusinto, 2019). Lebih lanjut bahwa komitmen organisasi ini mengarah pada unsur perasaan atau sikap hingga perwujudan perilaku dari seorang individu ketika harus menghadirkan sejumlah loyalitas dan di dalamnya dibarengi niat untuk melakukan pertahanan atas keanggotaannya dalam organisasi yang bersangkutan. Dengan begitu ketika pendamping desa tidak menghadirkan wujud pendampingan secara optimal maka desa tersebut dapat memilih pendekatan lain dengan mengundang akademisi dan praktisi untuk memberikan bantuan pendampingan atau menghadirkan mekanisme penyuluhan sekaligus sosialisasi yang dinilai paling tepat. Sebagai bentuk nyata terkait dukungan pemerintah daerah yang mengarah pada tata kelola keuangan desa memiliki landasan prinsip atas partisipasi kemudian berkaitan dengan akuntabilitas sekaligus transparansi yang mana pihak perangkat desa harus senantiasa mengikuti pelatihan yang sudah disediakan oleh pihak pemerintah daerah. hal tersebut sejalan dengan teori *stewardship* yang mana para aparatur dari tata kelola Dana desa harus mengedepankan komitmen secara maksimal terkait organisasi untuk memenuhi sejumlah kewajiban dalam konteks memberikan layanan kepada masyarakat secara masif terkait keberlangsungan komitmen organisasi dengan penjabaran kalau komitmen tersebut makin tinggi maka individu akan mendatangkan pengaruh dari konteks tingkat kecepatan sekaligus ketepatan kinerja yang juga diimbangnya selaku kualifikasi yang melekat dalam dirinya.

Dalam kaitannya dengan *teori stewardship*, variabel ini menunjukkan bahwa keberhasilan akan tercapai jika komitmen pemerintah daerah sebagai *steward* tinggi. Karena pengelolaan dana desanya berhasil, keberhasilan tersebut akan berdampak pada kepuasan masyarakat sebagai *principals*. Berdasarkan penelitian (Natalia & Coryanata, 2019) menegaskan kalau yang namanya komitmen organisasi mendatangkan pengaruh dengan sifat negatif terkait kecenderungan fraud atau kecurangan dan dalam riset (Rezeki, 2019), (Atmadja et al., 2018) komitmen pemerintah daerah tidak mendatangkan pengaruh dengan atas keberhasilan pengelolaan dana desa. Namun temuan riset ilmiah berbeda oleh (Julianto & Dewi, 2019), (Hasanah, 2021), (Sara, 2021) yang menerangkan bahwasanya komitmen pemerintahan daerah mendatangkan pengaruh dengan sifat yang signifikan atas keberhasilan pengelolaan dana desa.

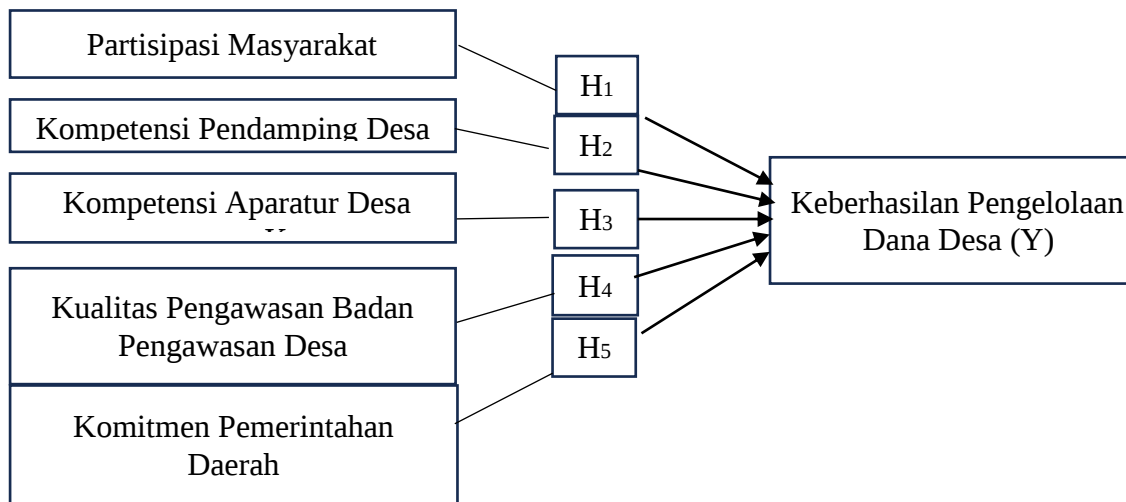
Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis kelima :

H5: Komitmen pemerintah daerah berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa

Kerangka Pemikiran

Kerangka pada suatu riset pastinya diperlukan untuk menunjukkan adanya pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen, Bahwa Variabel Independen pada riset ini yakni Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Pendamping Desa Dan Kompetensi Aparatur Desa, Kualitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa serta Komitmen Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk Variabel Dependen dalam riset ini yakni Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa.

Gambar 1
Kerangka Berpikir Penelitian



2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Riset ini melibatkan dua jenis variabel yakni variabel berbasis independen dan juga dependen. Adapun variabel independen sendiri mengarah pada partisipasi masyarakat kemudian kompetensi pendamping desa sekaligus kompetensi aparatur desa dan juga kualitas pengawasan (BPD) sekaligus komitmen dari pemerintah daerah. Sedangkan untuk variabel dependen sendiri memuat keberhasilan pengelolaan dana desa. Adapun pendekatan untuk riset ini menitikberatkan pada riset berbasis kuantitatif dengan pengujian hipotesis. Berikut dipaparkan perihal definisi operasional untuk tiap-tiap variabel dalam tabel 1 di bawah:

Tabel 1 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Sumber	Pengertian	Indikator
Partisipasi Masyarakat	(Wicaksana & Rachman, 2018)	Keterlibatan pihak masyarakat dalam konteks pembuatan putusan secara langsung ataupun tidak langsung dengan melibatkan lembaga perwakilan yang bisa menjadi media untuk penyaluran aspirasi.	Adapun indikator pengukuran variabel partisipasi masyarakat yakni: 1. Terkait dengan pengambilan suatu keputusan 2. Kemudian sangkutpautnya dengan penyusunan untuk kepentingan anggaran 3. Dan yang ketiga terkait

			pelaksanaan dari anggaran tersebut
Kompetensi Pendamping Desa	(Hasanah, 2021)	Keterampilan, pengetahuan, sikap yang dimiliki pihak pendamping desa dalam konteks pemberian dukungan atas tata kelola dana desa sekaligus pemberdayaan masyarakat di tingkat desa tersebut	Adapun indikator pengukuran variabel kompetensi pendamping desa yakni : 1. Pertama terkait knowledge alias pengetahuan 2. Selanjutnya yang kedua soal skill alias kemampuan 3. Dan yang terakhir terkait attitude alias sikap
Kompetensi Aparatur Desa	(Wicaksana & Rachman, 2018)	Pengetahuan, keahlian, kemampuan yang diperlukan aparatur desa dalam menyelesaikan tugasnya sebagai aparatur desa.	Adapun indikator pengukuran kompetensi aparatur desa yakni : 1. Pertama terkait knowledge alias pengetahuan 2. Selanjutnya yang kedua soal skill alias kemampuan 3. Dan yang terakhir terkait attitude alias sikap
Kualitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa	(Munti & Fahlevi, 2017)	Berkaitan dengan kegiatan yang diupayakan untuk melaksanakan pengawasan atas tatalaksana sekaligus pekerjaan yang diupayakan dengan konkret oleh pihak aparatur desa sejalan dengan perencanaan sekaligus peraturan yang sudah berlaku dan ditetapkan sebagaimana mestinya.	Adapun indikator pengukuran kualitas pengawasan badan permusyawaratan desa yakni : 1. Pertama terkait jadwal atas tindakan pengawasan 2. Berlanjut ke standarisasi atas pengawasan tersebut 3. Dan yang ketiga terkait hubungan timbal balik alias feedback yang

berhasil terjalin			
Komitmen Pemerintahan Daerah	(Hasanah, 2021)	Terkait dengan perasaan kemudian perwujudan sikap hingga tindakan dari individu yang bersangkutan dalam konteks pemberian loyalitas sekaligus niat dalam hal memberikan pertahanan atas keanggotaan dalam suatu organisasi yang diikutinya.	Adapun indikator pengukuran komitmen pemerintahan daerah yakni : 1. Berkaitan dengan ranah komitmen secara afektif 2. Lalu berlanjut ke komitmen berbasis berkelanjutan 3. Dan yang ketiga terkait komitmen berbasis normatif
Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa	(Hasanah, 2021)	Mengarah pada keberhasilan atas keseluruhan tindakan atau kegiatan dengan cakupan perencanaan kemudian pelaksanaan hingga tata usaha sekaligus pelaporan dan pertanggungjawaban atas dana desa demikian.	Terkait indikator atas pengukuran keberhasilan pengelolaan dana desa yakni : 1. Kejujuran dan hukum 2. proses

Sumber : Data Penelitian, (2021)

Seluruh variabel dalam riset ini mengedepankan kalkulasi dengan skala likert yang mana untuk kriteria skornya yakni dari 1-5. 1 merepresentasikan sangat tidak setuju, lalu untuk 5 mewakili sangat setuju yang mana dikaitkan dengan indikator pernyataan yang telah disajikan. Dengan menguji bahwa variabel independent yaitu Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Pendamping Desa Dan Kompetensi Aparatur Desa, Kualitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa serta Komitmen Pemerintah Daerah yang mempengaruhi variabel dependen yakni Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa.

Populasi dan Sampel

Adapun populasi yang terlibat untuk kepentingan riset ini yakni memuat 8 desa yang tercatat secara resmi di kawasan Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur. Teknik pengambilan sampel pada riset ini menekankan metode berbasis *nonprobability sampling* dengan teknik *sampling jenuh*. Sampel riset mencakup seluruh pemerintah desa yang terdiri dari Kepala Desa (Kades), Sekretaris Desa (Sekdes), Bendahara Desa, Kepala Urusan (Kaur), Kepala Seksi (Kasi), serta seluruh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur. Berdasarkan observasi peneliti, keseluruhan yang bekerja di pemerintahan desa Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur berjumlah 96 orang dari 8 desa. dimana setiap desa memiliki 7 aparatur desa, dan 5 badan permusyawaratan desa.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk kepentingan penghimpunan data dengan teknik penyebaran kuesioner dengan jenis data primer. Penyebaran kuesioner yang dilakukan menggunakan beberapa pernyataan yang nantinya akan di jawab oleh responden. Peneliti menggunakan skala likert untuk merespon pernyataan tersebut. Para responden dapat menilai sejauh mana kesetujuan mereka terhadap pernyataan tersebut dengan menggunakan 5 skala likert 1 (sangat tidak setuju) dan 5 (sangat setuju). Alat analisis dengan menggunakan bantuan program software SmartPLS versi 4.0 mencakup evaluasi outer model dan inner model.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian

Identifikasi Responden

Berikut paparan terkait data pendeskripsian pada riset ini:

Tabel 2 Deskripsi Kuesioner Responden

Keterangan	Frekuensi	Presentase
Kuesioner Disebar	96	100%
Kuesioner Kembali	96	100%
Kuesioner Tidak Kembali	0	0
Kuesioner Memenuhi Syarat	96	100%
Kuesioner Tidak Memenuhi Syarat	0	0

Sumber : Data Primer, Hasil Penelitian pada Tahun 2023

Melalui tabel 2 dapat dipahami kalau kuesioner yang telah terbagi kepada pihak responden memuat 96 kuesioner dan keseluruhannya telah mengembalikan sejalan dengan penyerahan yang dilakukan. Dalam survei tersebut profil responden diurutkan dengan dasar kuantitas atas responden yang bersangkutan diantaranya yakni jenis kelamin kemudian mengarah pada unsur umur, lalu kaitannya dengan pendidikan terakhir, serta yang terakhir yakni terkait lama masa menjabat dalam pekerjaan.

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Paparan spesifikasi pihak responden dengan dasarnya yakni jenis kelamin, meliputi:

Tabel 3 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Laki-Laki	68	70,8%
2	Perempuan	28	29,2%
	Total	96	100%

Sumber : Data Primer, Hasil Penelitian pada Tahun 2023

Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Paparan spesifikasi pihak responden dengan dasarnya yakni umur, meliputi:

Tabel 4 Distribusi Responden Berdasarkan Umur

No	Umur	Jumlah	Presentase
1	20-29 tahun	17	21,88%
2	30-39 tahun	58	60,41%

3	40-49 tahun	21	21,71%
4	>50 tahun	0	0%
Total		96	100%

Sumber : Data Primer, Hasil Penelitian pada Tahun 2023

Dari tabel 4 dapat diketahui kalau karakteristik pihak responden dengan dasar usia lebih didominasi usia 30 sampai 39 tahun dengan persentase 60,41% sementara sisanya yakni usia 40 sampai 49 tahun dengan persentase 21,7% dan untuk usia 17 tahun yakni 21,88%.

Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan

Paparan spesifikasi pihak responden dengan dasarnya yakni lama jabatan, meliputi:

Tabel 5 Distribusi Responden Berdasarkan Lama Jabatan

No	Lama Jabatan	Jumlah	Presentase
1	<1 tahun	0	0%
2	1-5 tahun	92	95,83%
3	6-10 tahun	4	4,17%
4	>10 tahun	0	0%
Total		96	100%

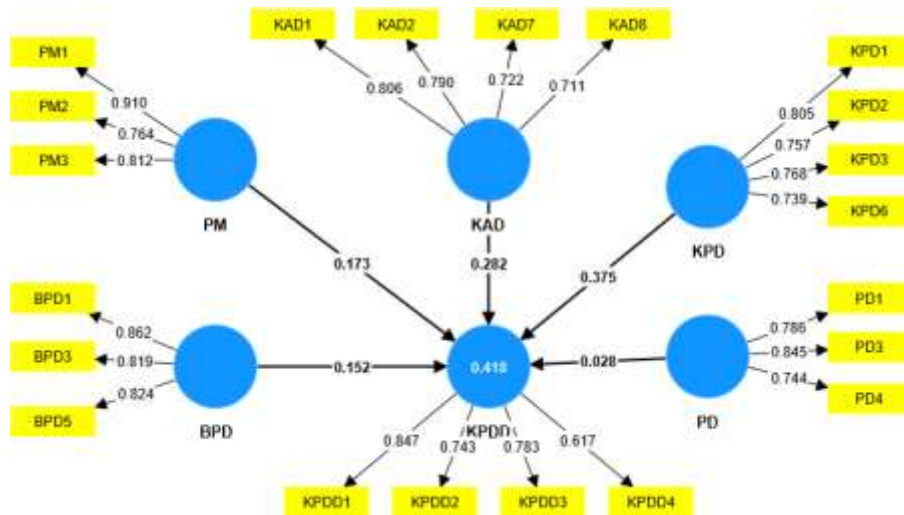
Sumber : Data Primer, Hasil Penelitian pada Tahun 2023

Melalui paparan yang tersaji dalam tabel 5 menerangkan kalau sebagian besar desa menjabat dalam kurun 1 sampai 5 tahun dengan kuantitas jumlah yakni 92 orang dengan persentase 95,83% sementara sisanya yakni periode jabatan 6 sampai 10 tahun dengan 4 responden yang persentasinya yakni 4,17%.

Analisis Data

Setelah data berhasil dihimpun untuk kemudian diupayakan pengelolaan dengan melibatkan bantuan Microsoft Excel 2010 untuk kemudian dilakukan pengujian terkait hipotesis yang melibatkan aplikasi smart pls 4.0 dengan pendekatan SEM dengan basis PLS. Adapun langkah pertama dari pengujian yakni dengan cara melibatkan pengujian outer model alias uji validitas dan reliabilitas. Dan langkah lanjutan yakni dengan pengujian model struktur atau inner model dan terakhir yakni pengujian hipotesis. Berikut dipaparkan terkait tata pengelolaan data dengan dasar 6 variabel yang sudah disebutkan sebelumnya:

Gambar 2 Model Konseptual Penelitian



Sumber : Data Diolah Menggunakan *SmartPls*, pada Tahun 2023

Outer Model

Guna memahami terkait kualitas data pada tiap-tiap variabel laten dengan melibatkan indikator lain maka butuh pengujian outer model yang mana hal ini melibatkan tahap kecocokan model dengan mengedepankan validitas atas konvergen dan diskriminan sekaligus reabilitas di dalamnya.

Uji Validitas

Uji Validitas Konvergen

Maksud dari validitas konvergen di sini mengarah pada model pengukuran yang diberikan nilai dengan dasar korelasi terkait indeks dan reflektif indikator. Berikut paparan atas validasi pada pls yang bisa diamati melalui tabel berikut:

Tabel 6 Nilai Outer Loading Factor

Variabel	Indikator	Nilai Loading	Hasil
Partisipasi Masyarakat (X1)	PM1	0.910	Valid
	PM2	0.764	Valid
	PM3	0.812	Valid
Kompetensi Pendamping Desa (X2)	KPD1	0.805	Valid
	KPD2	0.757	Valid
	KPD3	0.768	Valid
	KPD6	0.739	Valid
Kompetensi Aparatur Desa (X3)	KAD1	0.806	Valid
	KAD2	0.790	Valid
	KAD7	0.722	Valid
	KAD8	0.711	Valid
Kualitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (X4)	BPD1	0.862	Valid
	BPD3	0.819	Valid

Komitmen Pemerintahan Daerah (X5)	BPD5	0.824	Valid
	PD1	0.786	Valid
	PD3	0.845	Valid
	PD4	0.744	Valid
Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa (X6)	KPDD1	0.847	Valid
	KPDD2	0.743	Valid
	KPDD3	0.783	Valid
	KPDD4	0.617	Valid

Sumber : Olah Data SmartPls, Hasil Penelitian (2023)

Hasil pengelolaan data ini, dengan menghapus beberapa instrumen yang tidak valid. Ada dua uji validitas yang perlu dilakukan yaitu validitas konvergen dan diskriminan. Pengujian validitas konvergen, didasarkan pada nilai AVE atau average variance extracted dan nilai standardized loading factor. Rekomendasi nilai $AVE > 0,5$, sedangkan loading factor idealnya $\geq 0,7$ sedangkan riset berbasis exploratory masih dapat diterima nilai loading factor $0,6 - 0,7$ (Iman Ghozali, n.d.) Maka dijelaskan bahwa outer model atau korelasi antara konstruk dengan variabel secara keseluruhan untuk nilai loading faktor telah $> 0,6$ sehingga konstruk untuk semua variabel telah memenuhi validitas. Pada temuan riset, variabel Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Pendamping Desa Dan Kompetensi Aparatur Desa, Kualitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa serta Komitmen Pemerintah Daerah lebih besar dari $0,6 (> 0,6)$. Selain itu, uji validitas konvergen dapat dilakukan dengan melihat Hasil Output nilai *Average Variance Extracted* (AVE) dari setiap instrument pada indikator variabel $> 0,5$ sehingga dikatakan valid. Berdasarkan dari *Average Variance Extracted* (AVE) dari setiap variabel :

Tabel 7 Average Variance Extracted (AVE)

Variabel	Average Variance Extracted (AVE)
Partisipasi Masyarakat	0.697
Kompetensi Pendamping Desa	0.575
Kompetensi Aparatur Desa	0.589
Kualitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa	0.566
Komitmen Pemerintahan Daerah	0.628
Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa	0.691

Sumber : Olah Data SmartPls, Hasil Penelitian (2023)

Melalui temuan pada riset ini dapat dilihat nilai AVE nilainya melebihi $0,50$ sehingga disimpulkan bahwa konstruk memiliki convergent validity yang digunakan valid.

Uji Validitas Deskriminan

Perlu dipahami bahwa pengujian validitas diskriminan ini bisa dilakukan penilaian dengan dasarnya Cross loading di mana hal tersebut dapat ditetapkan valid ketika nilai indikator dari variabel utama mempunyai hasil nilai yang lebih besar ketimbang nilai tiap-tiap indikator di variabel lain. Adapun kalkulasi dari pengujian ini melibatkan beberapa hal diantaranya yakni: (a) Fornell and Lacker Criterion yaitu akar kuadrat dari AVE dan (b) cross loading dan (c) heterotrait-monotrait ration (rasio HTMT). Adapun nilai dari hasil pengujian validitas diskriminan adalah sebagai berikut :

Tabel 8 Fornell-Lacker Criteria

Variabel	BPD	KAD	KPD	KPDD	PD	PM
Kualitas Pengawasan Badan Permasyarakatan Desa	0.835					
Kompetensi Aparatur Desa	0.226	0.758				
Kompetensi Pendamping Desa	0.046	0.128	0.768			
Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa	0.283	0.384	0.504	0.752		
Komitmen Pemerintahan Daerah	0.314	0.223	0.264	0.279	0.793	
Partisipasi Masyarakat	0.238	0.077	0.451	0.406	0.239	0.832

Sumber : Olah Data SmartPls, Hasil Penelitian (2023)

Tabel 9 Validitas Diskriminan HTMT

Variabel	BPD	KAD	KPD	KPDD	PD	PM
Kualitas Pengawasan Badan Permasyarakatan Desa	0.835					
Kompetensi Aparatur Desa	0.226	0.758				
Kompetensi Pendamping Desa	0.046	0.128	0.768			
Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa	0.283	0.384	0.504	0.752		
Komitmen Pemerintahan Daerah	0.314	0.223	0.264	0.279	0.793	
Partisipasi Masyarakat	0.238	0.077	0.451	0.406	0.239	0.832

Sumber : Olah Data SmartPls, Hasil Penelitian (2023)

Berdasarkan tabel 8 kriteri nilai pada Fornell-Larcker dikatakan valid dilihat berdasarkan nilai di tiap indikator atas variabelnya lebih besar ketimbang variabel lain. Adapun nilai HTMT yang digunakan kurang dari 0,9 menunjukkan validitas diskriminannya telah diterima.

Uji Reabilitas

Guna memahami apakah variabel dalam riset sudah terlabeli sebagai hal yang reliable atau sebaliknya maka butuh pengujian syarat yang secara menyeluruh dengan begitu ditetapkan pengujian untuk mengamati terkait nilai dari Cronbach's Alpha dan Composite Reliability.

Tabel 10 Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	Status
1	Kualitas Pengawasan Badan Permasyarakatan Desa	0.785	0.803	<i>Reliable</i>
2	Kompetensi Aparatur Desa	0.753	0.758	<i>Reliable</i>
3	Kompetensi Pendamping Desa	0.768	0.773	<i>Reliable</i>
4	Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa	0.738	0.747	<i>Reliable</i>
5	Komitmen Pemerintahan Daerah	0.732	0.816	<i>Reliable</i>
6	Partisipasi Masyarakat	0.791	0.947	<i>Reliable</i>

Sumber : Olah Data SmartPls, Hasil Penelitian (2023)

Dari tabel 10 diatas bisa diambil simpulan hasil nilai nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability bahwa nilainya terpenuhi sebesar >0.70 . sehingga dapat pengujian selanjutnya.

Uji Multikol dan Kelayakan Model

Jika melihat hasil dari penelitian, peneliti mampu menyimpulkan bahwa evaluasi model struktural yang berkaitan dengan pengujian hipotesis pengaruh anantara variabel penelitian ini dapat diterima. Karena uji multikolinier dengan melihat nilai Inner VIF yaitu perolehan nilai kualitas pengawasan badan permusyawaratan desa 1.201, kompetensi aparatur desa 1.092, kompetensi pendamping desa 1.330, komitmen pemerintahan daerah 1.222, partisipasi masyarakat 1.342. secara keseluruhan nilai inner VIF dalam penelitian ini <5 sehingga bebas dari multikolinier.

Evaluasi Model Struktural

Diupayakan pengujian inner model atau model struktural yang mana hal ini melakukan penilaian atas signifikansi di mana lebih lanjut dipaparkan terkait hubungan antar konstruk serta R square yang mana hal tersebut ditekankan dalam riset ini. R square pada inner model sengaja dilibatkan untuk kepentingan evaluasi konstruktif yang sifatnya dependen dan untuk hasil ujinya sendiri dipaparkan dalam tabel berikut:

Tabel 11 R- Square

	R-Square	R-Square adjusted
Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa	0.418	0.386

Sumber : Olah Data SmartPls, Hasil Penelitian (2023)

Berlandaskan paparan dalam tabel 11 untuk nilai 0,418 memiliki indikasi kalau variabel yang sifatnya dependen yakni Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa (Y) dapat di jelaskan oleh variabel Partisipasi Masyarakat (X1), Kompetensi Pendamping Desa (X2), Kompetensi Aparatur Desa (X3), Kualitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (X4), dan Komitmen Pemerintahan Daerah (X5) dengan angka 41,8%. 58,2% sisanya bisa diterangkan oleh variabel lain yang pada riset ini tidak diulik lebih lanjut.

Uji Hipotesis

Perlu dipahami kalau dasar penentu dalam uji hipotesis di dalam riset ini mengarah pada pemahaman dan penglihatan atas nilai original sample yang memiliki arti sebagai koefisien pengaruh antar variabel yang kemudian melibatkan t- statistik yang diperuntukkan bagi kepentingan pencarian atas tingkat signifikansi dan penentuan korelasi positif ataupun negatif yang berpijak pada nilai path coefficient. Hasil pengujian dapat dilihat dari nilai p-value $< 0,05$ atau nilai *t-statistic* $>$ critical value 1,96 (signifikan level = 5%). Dalam riset ini terdapat pengaruh secara langsung dikarenakan ada variabel bersifat bebas dan terikat pada path coefficient dengan bootstrapping seperti yang tersaji pada tabel ini:

Tabel 12 Pengujian Hipotesis

Variabel	H	<i>Original sampel (O)</i>	<i>T-Statistics (O/StDe)</i>	<i>P Values</i>	Ket.
Kualitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa -> Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa	H1	0.152	1.559	0.119	Tidak Signifikan
Kompetensi Aparatur Desa -> Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa	H2	0.282	3.369	0.001	Signifikan
Kompetensi Pendamping Desa -> Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa	H3	0.375	4.164	0.000	Signifikan
Komitmen Pemerintahan Daerah -> Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa	H4	0.028	0.266	0.790	Tidak Signifikan
Partisipasi Masyarakat -> Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa	H5	0.173	2.100	0.036	Signifikan

Sumber : Olah Data SmartPls, Hasil Penelitian (2023)

Pembahasan

Uji Hipotesisi 1 :

Pengaruh Kualitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil temuan menunjukkan nilai original sampel Kualitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa berpengaruh positif terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa sebanyak 15.2% dan tidak signifikan dengan nilai t-statistik ($1.559 < 1.96$) dan p-value ($0.119 > 0.005$) sehingga dapat diartikan hipotesis ditolak. Riset ini nampaknya tidak sejalan dengan teori stewardship yang mana menerangkan kalau pengawasan memiliki aspek krusial dalam unsur keberhasilan atas tata kelola dana desa. Selanjutnya terkait pemerintah desa senantiasa berupaya menyelaraskan tujuan dengan pihak principal yang menitikberatkan pada prinsip tanggung jawab serta kejujuran dan juga mengedepankan integritas atas aktivitas yang telah dilaksanakannya. Namun perlu dipahami kalau usaha untuk meraih tujuan dalam suatu organisasi dan mengupayakan pertanggungjawaban tidak bisa berjalan dengan optimal karena kinerja BPD dalam pengawasan penggunaan dana desa di daerah tersebut dikatakan belum maksimal padahal faktor pengawasan sangat mendatangkan pengaruh terkait keberhasilan tata kelola dana desa tersebut. Hal ini memiliki keterkaitan yang secara khusus mengarah pada penyusunan skala prioritas ketika melakukan penentuan atas rencana kegiatan dan bisa menjadi bahan pertimbangan untuk potensi desa yang bersangkutan sekaligus berkaitan dengan kebutuhan masyarakat sehingga hasil dari pengelolaan dana desa bisa dirasakan secara maksimal tidak hanya bagi pihak-pihak berkepentingan saja tapi juga seluruh masyarakat tanpa terkecuali sehingga keseluruhan proses perencanaan dan pemeliharaan bisa berlangsung dengan lebih maksimal.

Uji Hipotesis 2 :

Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil temuan menunjukkan nilai original sampel Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh positif terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa sebanyak 28.2% dan signifikan dengan nilai t-statistik ($3.369 > 1.96$) dan p-value ($0.001 < 0.05$) sehingga dapat diartikan hipotesis diterima. Hasil riset ini sejalan dengan prinsip stewardship yang menegaskan bahwa para eksekutif sebagai manajer memiliki peran utama dalam meraih target organisasi di mana mereka beroperasi. Dalam mengelola alokasi dana desa, kesiapan yang memadai, termasuk sumber daya manusia yang berkualitas, menjadi hal sangat krusial. Teori stewardship menyoroti bahwa ketrampilan aparat desa dapat dinilai dari kemampuannya dalam merumuskan keputusan dan mengambil langkah yang paling tepat untuk meningkatkan kinerja perusahaan yang dipimpinnya (Rahayu & Gudono, 2016) dalam (Suryani & Suprasto, 2021). Maka, ketika membuat keputusan terkait penggunaan dana desa, diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang optimal untuk memberikan layanan sesuai dengan tanggung jawab seorang aparat desa. Oleh karena itu, teori stewardship dapat dianggap sebagai kerangka kerja yang relevan dalam konteks penelitian ini, di mana setiap aparat desa memiliki tujuan bersama, yaitu lebih mementingkan tujuan organisasi daripada tujuan pribadi. Dengan demikian, berhasilnya pengelolaan dana desa dapat terwujud. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian lainnya oleh (Aprilya & Fitria Astri, 2020), (Periansya & Sopiyan, 2020), (Suryani & Suprasto, 2021), (Atiningsih & Ningtyas, 2019), (Wicaksana & Rachman, 2018), yang menerangkan kalau kompetensi aparatur desa mengantongi pengaruh dengan sifat yang signifikan pada pengelolaan dana desa.

Uji Hipotesis 3 :

Pengaruh Kompetensi Pendamping Desa terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil temuan menunjukkan nilai original sampel Kompetensi Pendamping Desa berpengaruh positif terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa sebanyak 37.5% dan signifikan dengan nilai t-statistik ($4.164 > 1.96$) dan p-value ($0.000 < 0.05$) sehingga diartikan hipotesis diterima. Temuan dalam riset ini sejalan dengan teori stewardship yang merefleksikan keadaan di mana pihak manajemen tidak termotivasi oleh tujuan berbasis individu tapi condong pada sasaran terkait hasil utama yang menjadi kepentingan suatu organisasi (Donaldson dan Davis, 1991). Lebih lanjut kalau peran pendamping desa sebagai organisasi berbasis publik yang senantiasa bertindak sebagai pihak Steward lebih menitikberatkan pada kecakapan dalam konteks menghadirkan layanan paling maksimal kepada pihak masyarakat yang mana bertindak selaku prinsip principal, jadi organisasi tetap mempunyai reputasi atas kinerja secara unggul dan akuntabel di mata masyarakat. Hal ini memiliki arti kalau variabel peran pendamping desa mempunyai efek secara positif dan juga signifikan terkait variabel pengelolaan dana desa di kecamatan kaur tengah. Selanjutnya hal ini membuktikan kalau peran pendamping desa yang kian meninggi maka hal tersebut mendatangkan efek yang positif pada tingkat pengelolaan desa yang mana hal tersebut akan berimbas secara positif terkait hasil laporan keuangan yang tersaji. Riset ini sejalan dengan penelitian terdahulu yakni oleh (Aprilya & Fitria Astri, 2020), (Periansya & Sopiyan, 2020), (Suryani & Suprasto, 2021), (Atiningsih & Ningtyas, 2019), (Wicaksana & Rachman, 2018), menerangkan kalau kompetensi pendamping desa mendatangkan pengaruh terkait pengelolaan dana desa.

Uji Hipotesis 4 :

Pengaruh Komitmen Pemerintahan Daerah terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil temuan menunjukkan nilai sampel Komitmen Pemerintahan Daerah berpengaruh positif terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa sebanyak 2.8% dan tidak signifikan dengan nilai t-statistik ($0.266 < 1.96$) dan p-value ($0.790 > 0.005$) sehingga dapat diartikan hipotesis ditolak. Dapat dikatakan bahwa pesan pemerintah daerah kecil dalam pengelolaan anggaran dana desa. Pemerintah daerah dapat bersinergi dengan perangkat desa dalam hal memfasilitasi pelatihan, pengawasan, pembinaan, dan pendampingan. Dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah mempunyai ruang lingkup pemerintahan tersendiri yang berdasarkan APBD (Anggaran Daerah), sedangkan pemerintah desa juga mempunyai pemerintahan otonom yang berdasarkan APBDesa (Anggaran Desa). Komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran dana desa dibuktikan melalui pengawasan berupa rancangan APBDes sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa untuk diawasi dan dievaluasi. Hingga saat ini pengawasan dalam rangka pemeriksaan masih belum diatur. Namun konvensi yang berlaku saat ini menyepakati audit yang dilakukan oleh inspektorat kabupaten/kota oleh bupati melalui bupati. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah daerah tidak terlalu melakukan intervensi terhadap pengelolaan anggaran dana desa. Namun pemerintah daerah harus memberikan dukungan berupa pengawasan terhadap rancangan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran dari dana desa tersebut. Hal ini tidak sejalan dengan teori *stewardship* yang menyatakan bahwa keberhasilan akan tercapai jika komitmen pemerintah daerah sebagai *steward* tinggi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Atmadja et al., 2018), menyatakan bahwa komitmen pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan anggaran desa.

Uji Hipotesis 5 :

Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil temuan menunjukkan nilai original sampel Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa sebanyak 17.3% dan signifikan dengan nilai t-statistik ($2.100 > 1.96$) dan p-value ($0.036 < 0.05$), sehingga diartikan hipotesis diterima. Korelasi dengan teori *steward* menerangkan jika aparatur yang diberikan amanah berupa tugas sekaligus tanggung jawab harus senantiasa menghadirkan layanan kepada pihak masyarakat dalam bentuk perwujudan laporan secara akuntabel sejalan dengan aturan yang sudah ditetapkan sehingga keterlibatan masyarakat dalam pemantauan dan penilaian atas tata kelola Dana desa bisa membantu pengurangan atas kesalahan dan juga kecurangan sekaligus penyelewengan yang mungkin saja bisa dilangsungkan oleh pihak aparatur terkait. Dari segi teori para masyarakat selaku partisipan mengarah pada satu faktor yang mendatangkan pengaruh atas keberhasilan dari mekanisme pembangunan sekaligus pengembangan dari masyarakat pedesaan yang bersangkutan tersebut. Lebih lanjut dipaparkan jika partisipasi masyarakat harus senantiasa dikerahkan untuk menghadirkan perwujudan atas pembangunan desa yang sejalan dengan kebutuhan karena pihak tersebutlah yang sebenarnya sangat mengetahui kebutuhan sehingga harus dipenuhi yang mana hal tersebut berkaitan dengan penyusunan atas anggaran yang harus dialokasikan sebagaimana mestinya. Jadi dalam konteks partisipasi masyarakat memiliki aspek sosial dalam peningkatan keberhasilan terkait tata kelola dana desa. Jadi bisa dikatakan kalau partisipasi masyarakat kian meninggi maka keberhasilan tata kelola desanya juga akan lebih tercapai dengan maksimal. Riset tersebut sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu yakni (Sarifudin Mada , Lintje Kalangi, 2019), (Mada et al., 2017),

menyampaikan bahwasanya partisipasi masyarakat mendatangkan pengaruh pada pengelolaan dana desa.

4. KESIMPULAN

Berlandaskan paparan yang telah disajikan melalui riset ini maka dapat ditarik beberapa poin konklusi atau kesimpulan, yakni:

- a. Hasil pengujian hipotesis 1 menerangkan kalau variabel atas kualitas pengawasan BPD tidak mendatangkan pengaruh pada unsur keberhasilan pengelolaan dana desa.
- b. Hasil pengujian hipotesis 2 menerangkan kalau variabel atas kompetensi pendamping desa mendatangkan pengaruh dengan sifat yang positif juga signifikan pada unsur keberhasilan pengelolaan dana desa.
- c. Hasil pengujian hipotesis 3 menerangkan kalau variabel atas kompetensi aparatur desa mendatangkan pengaruh dengan sifat yang positif juga signifikan pada unsur keberhasilan pengelolaan dana desa.
- d. Hasil pengujian hipotesis 4 menerangkan kalau variabel atas komitmen pemerintahan daerah tidak mendatangkan pengaruh pada unsur keberhasilan pengelolaan dana desa.
- e. Hasil pengujian hipotesis 5 menerangkan kalau variabel atas partisipasi masyarakat mendatangkan pengaruh dengan sifat yang positif juga signifikan pada unsur keberhasilan pengelolaan dana desa.

Dalam riset ini tidak membahas aspek khusus yang mengarah pada ranah hukum dengan keterkaitan pada tata kelola Dana desa sehingga hal tersebut menjadi keterbatasannya. Pihak peneliti begitu menyadari kalau temuan dalam riset ini sudah dipaparkan sedemikian rupa atas realitas keilmiah yang masih banyak kekurangan sekaligus batasan. Oleh karenanya pihak peneliti bisa menghadirkan sejumlah saran khususnya perihal penambahan populasi dan sampel yang hendak dikaji dan melakukan perluasan atas riset lebih mendalam terkait sejumlah faktor yang mendatangkan pengaruh pada keberhasilan dalam tata kelola dana desa yang belum dikaji dalam riset ini contohnya terkait pelatihan atau tingkat pendidikan hingga ketaatan dalam konteks pelaporan keuangan yang bisa menjadi bahan pertimbangan untuk peneliti di masa mendatang.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan nikmat, rahmat serta kesehatan sehingga bisa menyelesaikan penelitian yang berjudul “Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Pendamping Desa, Kompetensi Aparatur Desa, Kualitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa serta Komitmen Pemerintahan Daerah terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa”.

Dalam proses penelitian ini, saya banyak mendapatkan bimbingan, pengetahuan serta dukungan dari banyak pihak yang selama ini membantu saya dalam menyelesaikan penelitian ini. Dengan hati tulus saya mengucapkan terimakasih terutama kepada kedua orang tua saya tercinta Bapak Mohammad Jauki, Ibu Mariani yang selalu kebersamaian saya, yang selalu memberi semangat dan tiada hentinya memberi doa untuk kelancaran putrinya ini dalam proses penelitian.

Terimakasih juga kepada Ibu Isma Coryanata selaku dosen pembimbing saya yang telah membantu saya demi kelancaran proses penelitian ini dan telah sabar membimbing serta menyempatkan waktunya disela kesibukannya. Dan untuk rekan seperjuangan saya Silvia Ratily Pakpahan, Alya Fitri Shagita, Nurhikmah Tri Lestari terimakasih atas membantunya selama ini dan selalu ada disetiap kesulitan yang saya alami dan yang terakhir kepada tuan dengan NIM 183 sebagai partner spesial saya, terimakasih telah menjadi sosok pendamping yang bersedia meluangkan waktunya untuk mendukung, menghibur serta memberikan semangat dalam segala hal untuk meraih apa yang menjadi impian saya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, A. H. (2019). Pengaruh Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Kinerja Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://www.neliti.com/publications/206054/pengaruh-pengawasan-badan-permusyawaratan-des-bpd-terhadap-kinerja-kepala-des>
- Anugrah, K. A., Prabowo, A. A., & Wardani, D. K. (2022). Pengaruh Komitmen Organisasi Perangkat Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Whistleblowing System Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Seluruh Kelurahan Di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal). *Jurnal Akuntansi Manajerial (Managerial Accounting Journal)*, 6(2), 13–28. <https://doi.org/10.52447/jam.v6i2.5562>
- Aprilya, K. R., & Fitria Astri. (2020). Pengaruh Kompetensi, Komitmen Organisasi, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(3), 1–20. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/2829/2839>
- Atiningsih, S., & Ningtyas, A. C. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali). *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 10(1), 2015–2019.
- Atmadja, A. T., & Saputra, A. K. (2018). THE INFLUENCE OF ROLE CONFLICT , COMPLEXITY OF ASSIGNMENT , ROLE OBSCURITY AND LOCUS OF CONTROL ON INTERNAL AUDITOR PERFORMANCE Anantawikrama Tungga Atmadja , Universitas Pendidikan Ganesha Bali. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 22(5), 1–26.
- Atmadja, A. T., Saputra, K. A. K., & Koswara, M. K. (2018). The influence of village conflict, village apparatus ability, village facilitator competency and commitment of local government on the success of budget management. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 22(1).
- Deny, & Khasna, S. (2022). Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penggunaan Dana Desa di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 2(1), 53–68. <https://doi.org/10.28918/manabia.v2i1.6006>
- Dewi, G. (2019). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1269. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i02.p16>

- Dewi, L. P. P., & Dewi, G. A. K. R. S. (2021). Pengaruh Kompetensi, Akuntabilitas Dan Peran Pendamping Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 12(01), 820–829.
- Hasanah. (2021). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Transparansi , Komitmen, Kompetensi, Serta Spiritual terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2013–2015.
- I Komang Gerdion Ananda Junior, I Ketut Kasta Arya Wijaya, & I Wayan Arthanaya. (2021). Efektivitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung). *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(2), 391–396. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3446.391-396>
- Iman Ghozali, L. 2016. (n.d.). *Partial Least Squares Konsep, Metode dan Aplikasi Menggunakan Program WARPPS 4.0*.
- Julianto, I. P., & Dewi, G. A. K. R. S. (2019). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Penggunaan Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Pendamping Desa Serta Komitmen Pemerintah Daerah Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(1), 24–42. <https://doi.org/10.23887/jia.v4i1.17242>
- Kharis, A. (2019). Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pada PT Avia Avian. *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Sistem Pengendalian Intern Pada Pt. Avia Avian*, 2, 113–150.
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill,”* 8(2), 106–115. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17199>
- Munti, F., & Fahlevi, H. (2017). *Determinan kinerja pengelolaan keuangan desa: Studi pada kecamatan gandapura kabupaten bireuen aceh.* core.ac.uk. <https://core.ac.uk/download/pdf/207888541.pdf>
- Natalia, L., & Coryanata, I. (2019). Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi Dan Budaya Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Pada Perusahaan Pembiayaan Kota Bengkulu. *Jurnal Akuntansi*, 8(3), 135–144. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.8.3.135-144>
- National Development Planning Agency (Bappenas). (2020). Rpjmn 2020-2024. *National Mid-Term Development Plan 2020-2024*, 313. <https://www.bappenas.go.id/id/data-dan...dan.../rpjmn-2015-2019/>
- Nurhalimah, S., & Supriyadi, I. (2022). Kewenangan Pendamping Desa Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Majalah Ilmiah Cahaya Ilmu*, 4(1), 53. <https://doi.org/10.37849/mici.v4i1.283>
- Nurkhasanah. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang). *Skripsi, UIN Walisongo Semarang*, 53(9), 1689–1699.
- Oktaviani, R. N., & Pramusinto, H. (2019). Peran Komitmen Organisasi Dalam Memediasi Disiplin, Lingkungan Kerja Fisik, dan Kompensasi. *Economic Education Analysis Journal*, 8(2), 814–833. <https://doi.org/10.15294/eeaj.v8i2.31518>

- Periansya, P., & Sopiyan, S. (2020). Dampak Kompetensi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Rambutan Banyuasin. *Jurnal Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya*, 21, ISSN : 2579-969.
- Priantana, R. D. (2023). *Pengaruh Kompetensi , Akuntabilitas , dan Peran Pendamping*. 11(1), 151–164. <https://doi.org/10.17509/jrak.v11i1.50434>
- Rezeki, S. E. (2019). Peran Tingkat Pendidikan Dalam Memoderasi Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Tambakromo. *Ekonomi*.
- Sara, I. M. (2021). Kualitas Sumber Daya Manusia dan Komitmen Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 268–284.
- Sarifudin Mada , Lintje Kalangi, H. G. (2019). Pengaruh Likuiditas dan Profitabilitas terhadap Struktur Modal dPengaruhKompetensiAparatPengelolaDanaDesa, KomitmenOrganisasi PemerintahDesa, danPartisipasiMasyarakat TerhadapAkuntabilitasPengelolaan Dana DesaDiKabupatenGorontaloan Rasio Aktivitas sebagai. *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen*, 3(12), 106–115.
- Suryani, N. M., & Suprasto, H. B. (2021). Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(8), 2011. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i08.p11>
- Wicaksana, A., & Rachman, T. (2018). PENGARUH KOMPETENSI APARATUR,PARTISIPASI MASYARAKAT, TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(1), 10–27. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>